



PEMERINTAH KABUPATEN
KABUPATEN TANA TORAJA

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TAHUN 2027



Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2027 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Renja ini disusun sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2027.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025–2029 yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja, serta target capaian kinerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun perencanaan. Renja ini juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM dalam rangka mendukung peningkatan kualitas manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

Penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2027 diawali dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan perencanaan pada tahun berjalan. Program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja ini diarahkan untuk mendukung peningkatan profesionalitas ASN, pengembangan kompetensi aparatur, penguatan sistem merit, serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian.

Kami berharap Renja BKPSDM Kabupaten Tana Toraja Tahun 2027 ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh aparatur dalam melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan akuntabel, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Akhir kata, kami menyadari bahwa dokumen Renja ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan dokumen perencanaan di masa yang akan datang

Makale, 10 Februari 2026

Kepala BKPSDM,



ALIPIUS TANDIARRANG, S.S., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19730302 200606 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

Daftar Tabel iv

BAB I Pendahuluan 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Landasan Hukum 2

 C. Maksud dan Tujuan 3

 D. Sistematika Penulisan 3

BAB II Hasil Evaluasi Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 4

 A. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian
 Renstra Perangkat Daerah 4

 B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15

 C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 17

 D. Riviui terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah 18

 E. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 18

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 19

 A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasionla dan Provinsi 19

 B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 20

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 24

BAB V Penutup 32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Tahun 2025 7

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tana Toraja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama 16

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2027 dan Perkiraan Maju 2028 25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tana Toraja Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja, evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya, Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Tahun 2027 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja Tahun 2027.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja Tahun 2027 berpedoman pada peraturan Perundang – undang atau Landasan Hukum yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No. 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
9. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 01 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja Tahun 2027 bertujuan :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan BKPSDM tahun 2027;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2027 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja secara sistematis dan teroganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2027 sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja.

D. Sistematika Penulisan

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja 2027 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan RENJA tahun 2027 dan capaian RENSTRA, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja, riview terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan telaah terhadap kebijakan-kebijakan nasional, tujuan dan sasaran RENJA serta program dan kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan Rencana Kerja Tahun 2027

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Kabupaten Tana Toraja Manusia Tahun 2025 dan Capaian Rencana Strategis (RENSTRA) BKPSDM Kabupaten Tana Toraja

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu bertujuan untuk mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyajikan hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 dan Tahun Berjalan yaitu tahun 2027 serta perkiraan target 2028. Pelaksanaan RENJA Tahun 2025 telah dilewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RENJA tahun 2025 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dana atau kegagalan pelaksanaan kebijakan / Program / kegiatan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan kebijakan / program / kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pada tahun 2025, Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan 3 (Tiga) Program, 10 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan dengan anggaran sebagaimana yang tertuang di dalam perubahan APBD Tahun 2025 sejumlah Rp. 5.290.638.000,- (Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) . Dalam Pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan dengan realisasi anggaran Rp. 4.700.426.355,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 89 persen.

Pelaksanaan program-program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Program Kepegawaian Daerah

Indikator program yang pertama pada program Presentase Perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi, Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya, Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya dan Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik , Program ini Dilaksanakan oleh Bidang Pengadaan, Disiplin dan Informasi Kepegawaian Bidang Mutasi dan Bidang Pengembangan SDM dengan anggaran Rp. 482.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 441.037.172'- atau sebesar 91 persen.

Kegiatan dan Subkegiatan yaitu :

Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Dengan realisasi untuk indikator Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian sebesar Rp.232.450.000,- dari anggaran Rp. 225.927.513,- atau terserap 97 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :

1. Subkegiatan penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau terserap 0 persen.
2. Subkegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK. Anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp. 84.150.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 83.433.200,- atau terserap 99 persen.
3. Subkegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian. Anggaran pada subkegiatan ini sebesar 143.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 142.494.313,- atau terserap 99 persen

Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN.

Dengan realisasi untuk indikator persentase pelayanan mutasi dan promosi ASN dengan anggaran Rp. 232.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 197.859.659,- atau terserap 85 persen yang terdiri dari 3 subkegiatan yaitu:

1. Subkegiatan Pengelolaan Mutasi ASN. Anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 40.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 40.109.659,- atau terserap 99 persen.
2. Subkegiatan kenaikan pangkat ASN. Anggaran pada Sub kegiatan ini sebesar Rp. 102.250.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 102.250.000 atau terserap sebesar 100 persen.
3. Subkegiatan Pengelolaan Promosi ASN. Anggaran pada Sub kegiatan ini sebesar Rp. 89.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 55.500.000 atau terserap sebesar 71 persen.

b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Indikator pada program pengembangan SDM adalah Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional , Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan, Persentase ASN yang memiliki Sertifikasi Kompetensi dan Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan SDM. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.090.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 859.597.412 atau sebesar 79 persen.

Kegiatan dan Subkegiatan

Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan realisasi sebesar Rp. 859.597.412,- dari anggaran Rp. 1.090.000.000,- atau terserap sebesar 79 persen. Yang terdiri dari 1 subkegiatan :

1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan. Anggaran pada subkegiatan ini sebesar 1.090.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 859.597.412,- atau sebesar 74 Persen.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator pada Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai dengan standar, program ini dilaksanakan oleh Sekretariat. Berdasarkan data anggaran dan realisasi belanja persasaran program Perangkat Daerah Tahun 2025 bahwa pagu anggaran sebesar Rp. 3.718.488.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 3.399.791.771,- dengan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 91 persen. Keberhasilan program internal BKSPDM Kabupaten Tana Toraja dalam memberikan pelayanan internal OPD didukung oleh Kompetensi ASN yang handal, sarana prasarana yang memadai, dan anggaran dari APBD. Program Internal tersebut terdiri dari 6 (lima) kegiatan antara lain Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA BKSPDM dan Pencapaian RENSTRA BKPSDM s.d Tahun 2025
Kabupaten Tana Toraja

Evaluasi Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025

OPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Terget Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2029 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2029		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10				12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar																					

		Perencana an, Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Penyusuna n Dokumen Perencana an, Pengangga ran dan Evaluasi Tepat Waktu																					
		Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	100	35.000.000	0	-	100	113.500.000	0	-	0	-	15,33	17.400.000	72,54	82.336.330	88	Rp 99.736.330,00	88	99.736.330	87,87	284,96	
			Rata-rata capaian kinerja (%)															87,87	87,87					
			Predikat kinerja															T	T					
		Administra si Keuangan Perangkat Daerah	presentase Administra si Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu																					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	100	3.332.315.349	99	2.518.324.264	100	2.660.874.000	20,29	539.983.264	20,75	552.067.902	15,03	399.994.638	35,04	932.459.705	91	Rp 2.424.505.509,00	190	4.942.829.773	190,12	148,33	
			Rata-rata capaian kinerja (%)															91,12	91,12					
			Predikat kinerja															ST	ST					
		Administra si Umum Perangkat Daerah	Persentase Administra si Umum Perangkat Darah Berjalan sesuai standar																					
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	20.000.000	83	21.542.000	100	10.343.000	0	-	24,73	2.558.000	20,75	2.146.000	0,00	0	45	Rp 4.704.000,00	128	26.246.000	128,48	131,23	

		Penyeleng raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyeleng araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	190.000.000	95	240.294.340	100	374.832.000	0	-	31,85	119.368.700	35,22	132.020.977	27,27	102.206.926	94	Rp 353.596.603,00	189	593.890.943	189,33	312,57	
			Rata-rata capaian kinerja (%)															69,91	69,91					
			Predikat kinerja															S	S					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi																					
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	20.000.000	0	-	100	44.395.000	0	-	0	-	0	-	100	44.395.000	100	Rp 44.395.000,00	100	44.395.000	100,00	221,98	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	15.000.000	83	71.400.000	100	315.250.000	0	-	57,10	180.000.000	0	-	40,45	127.529.090	98	Rp 307.529.090,00	181	378.929.090	180,55	2.526, 19	
			Rata-rata capaian kinerja (%)															98,78	98,78					
			Predikat kinerja															ST	ST					
		Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia																					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	70.000.000	0	-	100	60.714.000	0	-	0,74	450.000	13,35	8.106.000	77,44	47.019.000	92	Rp 55.575.000,00	92	55.575.000	91,54	79,39	

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	15.000.000	0	-	100	38.000.000	0	-	0	-	0	-	98,21	37.320.000	98	Rp 37.320.000,00	98	37.320.000	98,21	248,80	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	20.000.000	78	48.187.000	100	32.400.000	0	-	55,56	18.000.000	33,33	10.800.000	11,11	3.600.000	100	Rp 32.400.000,00	178	80.587.000	178,00	402,94	
			Rata-rata capaian kinerja (%)															96,58	96,58					
			Predikat kinerja																ST	ST				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara																					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	45.000.000	91	31.341.163	100	60.880.000	6,53	3.975.000	26,74	16.280.432	12,62	7.686.000	12,96	7.888.807	59	Rp 35.830.239,00	150	67.171.402	149,85	149,27	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100	10.000.000	88	9.415.000	100	7.300.000	0	-	37,26	2.720.000	20,27	1.480.000	0	-	58	Rp 4.200.000,00	146	13.615.000	145,53	136,15	
			Rata-rata capaian kinerja (%)																58,19	58,19				
			Predikat kinerja																R	R				

II		Program Kepegawai an Daerah	Persentase Perencana an Kebutuhan yang Sesuai dengan Formasi																					
			Persentase ASN yang Ditingkatka n Kompetens inya																					
			Persentase Pengemba ngan Karir ASN sesuai dengan Kompetens inya																					
			Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik																					
		Pengadaan , Pemberhen tian dan Informasi Kepegawai an ASN	Persentase Pengadaan , Pemberhen tian dan Informasi Kepegawai an																					
		Penyusuna n Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaa n Pengdaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusuna n Rencana Kebutuhan, Jenis dan JumlahJaba tan untuk Pelaksanaa n Pengadaan ASN	100	35.000.000	98	22.545.701	100	4.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Rp -	98	22.545.701	98,00	64,42	

		Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	100	190.000.000	98	359.058.568	100	84.150.000	0	-	25,37	21.350.000	52,05	43.800.000	21,73	18.283.200	99	Rp 83.433.200,00	197	442.491.768	197,15	232,89	
		Pengelolaan Sistem Informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	100	150.000.000	90	203.348.220	100	143.800.000	0	-	0	-	16,69	24.000.000	82,40	118.494.313	99	Rp 142.494.313,00	189	142.494.313	189,09	95,00	
			Rata-rata capaian kinerja (%)															66,08	66,08					
			Predikat kinerja															S	S					
		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pelayanan Mutasi dan Promosi ASN																					
		Pengelolaan mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	100	35.000.000	98	82.158.200	100	40.500.000	23,74	9.613.754	0	-	8,64	3.500.000	66,66	26.995.905	99	Rp 40.109.659,00	197	122.267.859	197,04	349,34	
		Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	100	120.000.000	83	276.184.257	100	102.250.000	0	-	2,29	2.337.000	32,40	33.125.000	65,32	66.788.000	100	Rp 102.250.000,00	183	378.434.257	183,00	315,36	
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	100	50.000.000	51	22.715.060	100	89.700.000	0	-	12,15	10.900.000	0	-	49,72	44.600.000	62	Rp 55.500.000,00	113	78.215.060	112,87	156,43	
			Rata-rata capaian kinerja (%)															86,97	86,97					

			Predikat kinerja															T	T						
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur																						
		Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	100	45.000.000	61	21.700.000	100	17.250.000	0	-	0	-	65,22	11.250.000	34,78	6.000.000	100	Rp 17.250.000,00	161	38.950.000	161,00	86,56		
			Rata-rata capaian kinerja (%)															100,00	100,00						
			Predikat kinerja															ST	ST						
II I		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional																						
			Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan																						
			Persentase ASN yang memiliki Sertifikasi Kompetensi																						
			Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan																						

			Kompetensi Teknis																					
		Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Sertifikasi, Kelembagaan, Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN																					
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	100	1.660.000.000	61	709.218.410	100	1.090.000.000	0	-	1,60	17.483.000	13,11	142.944.200	64,14	699.170.212	79	Rp 859.597.412,00	140	1.568.815.822	139,86	94,51	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		78,86	78,86					
Predikat kinerja																		T	T					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					6.057.315.349		4.637.432.183		5.290.638.000		553.572.018		943.515.034		838.252.815		2.365.086.488							
Rata-rata capaian kinerja (%)																		82,94	82,94					
Predikat kinerja																		T	T					

B. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja adalah melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah bidang kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi Kesekretariatan BKPSDM.

Upaya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator program sebagai berikut:

1. Persentase Pengadaan ASN, Pemberhentian ASN dan Informasi Kepegawaian;
2. Persentase pelayanan mutasi dan promosi ASN;
3. Persentase Pengembangan Kompetensi ASN;
4. Persentase aparatur yang bersertifikat kompetensi manajerial dan fungsional.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menetapkan indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tana Toraja

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

NO	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	61	68	71	75	78	61	
2	Indeks Sistem Merit	Persen	241	250	275	285	300	241	

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mengambil strategi dan kebijakan isu-isu penting bidang kepegawaian antara lain:

1. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, monitoring dan evaluasi serta sosialisasi peraturan kepegawaian;
2. Pemanfaatan manajemen teknologi informasi dalam pelayanan kepegawaian;
3. Kualitas manajemen organisasi serta efektifitas pemenuhan administrasi perkantoransarana dan prasarana dan peningkatan sistem akuntabilitas kinerja dan anggaran organisasi;
4. Penempatan aparatur sesuai kemampuan dan kompetensi aparatur.

Selain isu-isu diatas juga terdapat beberapa hal yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Adanya kendala-kendala seperti
 - Belum optimalnya dalam melaksanakan pelayanan dalam bidang kepegawaian
 - Masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia
 - Masih rendahnya tingkat kedisiplinan ASN
 - Belum Optimalnya penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada
 - Belum optimalnya fasilitasi kesejahteraan ASN dan data/informasi serta perkembangan Teknologi Informasi dibidang kepegawaian
2. Terdapat peluang antara lain :
 - Perkembangan Teknologi Informasi dibidang Kepegawaian
 - Aparatur daerah mengikuti perkembangan aturan-aturan kepegawaian
 - Aparatur sudah mengetahui prosedur pelayanan kepegawaian
 - Meningkatnya kedisiplinan pegawai
 - Meningkatnya sumber daya aparatur yang berkompeten
3. Adanya kekuatan antara lain :
 - Adanya kemudahan koordinasi dengan BKN, BKD Provinsi dan BPSDM
 - Loyalitas dan dedikasi pegawai tinggi;
 - Pengelolaan administasi kepegawaian yang baik;
 - Pelaksanaan sosialisasi kepegawaian yang baik;
 - Kemudahan dalam mengakses informasi dengan sistem infomasi dalam peningkatan pelayanan.

4. Adanya kelemahan antara lain :

- Belum optimalnya penggunaan teknologi Informasi;
- Belum optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian;
- Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur.

5. Adanya tantangan antara lain :

- Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam perencanaan dan pelaporan;
- Perubahan dan perkembangan peraturan di bidang kepegawaian;
- Penempatan ASN sesuai dengan kompetensi masih kurang;
- Tuntutan peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur Perangkat Daerah.

Dari isu-isu penting, kendala, peluang, tantangan, kekuatan dan kelemahan diatas maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tana Toraja menentukan kebijakan umum sebagai berikut :

1. Peningkatkan sumber daya aparatur dan disiplin ASN lingkup Kab. Tana Toraja;
2. Pemberdayaan sistem informasi manajemen kepegawaian berbasis teknologi informasi agar dapat diakses dengan mudah;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas administrasi perkantoran dan sarana dan prasarana;
4. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan serta kualitas pelayanan Perangkat Daerah;
5. Peningkatan pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai dengan kompetensi yang di butuhkan oleh Perangkat Daerah.

D. Review tentang Rancangan Awal OPD

Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025, Renstra PD dan disesuaikan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengajukan 3 Program, 9 Kegiatan dan 19 Subkegiatan yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

E. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai kewenangan dalam bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur sehingga tidak serta merta bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dari hasil musrembang kecamatan dan beberapa aspirasi masyarakat melalui DPRD beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti adalah pemerataan tenaga guru

dibeberapa sekolah dan tenaga kesehatan di beberapa pusat kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Tana Toraja.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan-kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tana Toraja berpedoman pada berbagai kebijakan nasional di bidang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengembangan sumber daya aparatur. Kebijakan-kebijakan nasional tersebut menjadi dasar dalam merumuskan program, kegiatan, indikator, serta target kinerja tahunan BKPSDM.

Salah satu kebijakan utama yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menekankan pentingnya penerapan sistem merit, profesionalisme, integritas, serta pembinaan karier ASN yang berbasis kompetensi. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, memberikan landasan bagi BKPSDM dalam melaksanakan seluruh siklus manajemen ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, penilaian kinerja, penegakan disiplin, hingga pengembangan kompetensi ASN.

Kebijakan nasional lainnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, yang mewajibkan penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai dasar penilaian kinerja ASN. Kebijakan ini mengharuskan BKPSDM untuk melakukan pendampingan, pengawasan, serta mendorong penerapan digitalisasi sistem penilaian kinerja melalui aplikasi e-Kinerja.

Selain itu, kebijakan Peraturan Menteri PANRB mengenai Sistem Merit dan Manajemen Talenta ASN mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan sistem pengelolaan ASN berbasis kompetensi dan kinerja, termasuk penyusunan talent pool, pemetaan kompetensi, serta mekanisme pengisian jabatan yang transparan, objektif, dan akuntabel.

Dalam bidang digitalisasi manajemen kepegawaian, BKPSDM juga mengacu pada kebijakan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Implementasi SIASN menuntut pemutakhiran data ASN secara berkelanjutan,

peningkatan kapasitas pengelola kepegawaian, serta integrasi antara Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) daerah dengan sistem nasional.

Di sisi lain, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020–2025 serta kewajiban penilaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) mendorong BKPSDM untuk terus memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta memperbaiki kualitas pelayanan administrasi kepegawaian.

Berdasarkan berbagai kebijakan nasional tersebut, arah kebijakan yang perlu menjadi fokus dalam penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Tana Toraja meliputi:

1. Peningkatan kualitas manajemen ASN berbasis sistem merit;
2. Pengembangan kompetensi ASN secara terencana dan terukur;
3. Penguatan sistem penilaian kinerja ASN;
4. Digitalisasi layanan kepegawaian melalui SIASN dan SIMPEG; serta
5. Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dengan demikian, telaahan terhadap kebijakan nasional menjadi landasan penting bagi BKPSDM Kabupaten Tana Toraja dalam menetapkan program dan kegiatan strategis yang mendukung terwujudnya ASN yang profesional, kompeten, dan berintegritas.

B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Tujuan dan sasaran PD didasarkan pada RENSTRA BKPSDM Kab. Tana Toraja antara lain :

1. Mewujudkan manajemen ASN Profesional dan berbasis sistem merit;
2. Meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM Aparatur;
3. Meningkatkan kinerja ASN dan layanan administrasi kepegawaian;
4. Mendukung reformasi Birokrasi Daerah.

Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia antara lain :

1. Tersediannya data dan layanan kepegawaian yang akurat dan terintegrasi;
2. Meningkatnya kompetensi teknis, manjerial, dan sosial kultural ASN;
3. Meningkatnya kinerja ASN sesuai terget organisasi;
4. Terlaksananya pengembangan karier yang objektif dan berbasis merit;
5. Meningkatnya tata kelola kepegawaian dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Tujuan dan sasaran tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penetapan program, kegiatan, indikator kinerja, serta target capaian yang akan dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Tana Toraja dalam tahun perencanaan.

C. Program dan Kegiatan

Tahun 2027 Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia terdiri dari 3 program, 13 kegiatan dan 36 Subkegiatan dengan pagu sebesar Rp. 6.434.368.148 yang berasal dari APBD Kabupaten Tana Toraja tahun 2027 dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 - Sosialisasi peraturan perundang-undangan
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
2. Program Kepegawaian Daerah
- a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
 - Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN
 - Koordinasi dan fasilitasi pengadaan ASN dan PPPK
 - Evaluasi pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
 - Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian
 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - Pengolahan data kepegawaian
 - b. Mutasi dan Promosi ASN
 - Pengelolaan Mutasi ASN
 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - Pengelolaan Promosi ASN
 - c. Pengembangan Kompetensi ASN
 - Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
 - Pengelolaan administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
 - Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN
 - Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
 - Fasilitasi sertifikasi jabatan ASN (UD,PI)
 - Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
 - Fasilitasi pengembangan karier dalam jabatan fungsional
 - d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
 - Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai
 - Pembinaan disiplin ASN
 - Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- a. Pengembangan Kompetensi Teknis
 - Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan

pemerintahan konkuren perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintah umum

- Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

b. Serifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

- Penyelenggaraan pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2027. Rencana kerja ini disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025–2029.

Program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja BKPSDM Tahun 2027 difokuskan pada peningkatan kualitas manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur, peningkatan kinerja ASN, serta penguatan tata kelola administrasi kepegawaian yang efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu, rencana kerja ini juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi serta penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

Pendanaan program dan kegiatan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2027 yang disesuaikan dengan pagu indikatif perangkat daerah. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan seperti pengelolaan administrasi kepegawaian, pengembangan kompetensi ASN, penguatan sistem informasi kepegawaian, serta peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian.

Selanjutnya, rincian rencana program, kegiatan, indikator kinerja, target capaian, serta kebutuhan pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja Tahun 2027 dituangkan dalam tabel rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen Renja ini

Tabel 4.1

PROGRAM DAN KEGIATAN OPD
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2027

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REK					PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	BIDANG URUSAN	URUSAN	TAHUN ANGGARAN 2027			CATATAN PENTING	RENCANA T.A 2028	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	03					KEPEGAWAIAN										
5	03	01				1. Program Penunjang Uruan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	BKPSDM	Kepegawaian		100%	3.880.368.148			100%	3.967.000.000
5	03	01	2.01			- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu	BKPSDM	Kepegawaian		100%	50.000.000	APBD		100%	65.000.000
5	03	01	2.01	01		- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM	Kepegawaian		5 Dok	30.000.000	APBD		5 Dok	35.000.000
5	03	01	2.01	02		- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BKPSDM	Kepegawaian		2 Dok	15.000.000	APBD		2 Dok	20.000.000
5	03	01	2.01	07		- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM	Kepegawaian		2 Dok	5.000.000	APBD		2 Dok	10.000.000
5	03	01	2.02			- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waltu	BKPSDM	Kepegawaian		100%	3.295.368.148	APBD		100%	3.300.000.000
5	03	01	2.02	01		- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	Kepegawaian		518 OB	3.295.368.148	APBD		518 OB	3.300.000.000

5	03	01	2.05		-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daeah	Persentase Pegawai Pd yang dilayani	BKPSDM	Kepegawaian		100%	65.000.000	APBD		100%	75.000.000
5	03	01	2.05	02	-	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atributnya	BKPSDM	Kepegawaian		40 Paket	45.000.000	APBD		40 Paket	50.000.000
5	03	01	2.05	09	-	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Lulus Diklat berdasrkan Tusi	BKPSDM	Kepegawaian		4 Org	12.000.000	APBD		4 Org	15.000.000
5	03	01	2.05	10	-	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang memahami peraturan perundangan	BKPSDM	Kepegawaian		4 Org	4.000.000	APBD		4 Org	5.000.000
5	03	01	2.05	11	-	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	BKPSDM	Kepegawaian		4 Org	4.000.000	APBD		4 Org	5.000.000
5	03	01	2.06		-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Berjalan sesuai standar	BKPSDM	Kepegawaian		100%	200.000.000	APBD		100%	217.000.000
5	03	01	2.06	03	-	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan RT PD yang disediakan	BKPSDM	Kepegawaian		4 Paket	14.000.000	APBD		4 Paket	20.000.000
5	03	01	2.06	05	-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan yang disediakan dan digandakan	BKPSDM	Kepegawaian		4 Paket	4.000.000	APBD		4 paket	5.000.000
5	03	01	2.06	06	-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah exp bacaan dan perundangan disediakan	BKPSDM	Kepegawaian		4 Paket	2.000.000	APBD		4 Paket	2.000.000
5	03	01	2.06	09	-	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	BKPSDM	Kepegawaian		80 Laporan	180.000.000	APBD		90 Laporan	190.000.000
5	03	01	2.07		-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang yang terpenuhi	BKPSDM	Kepegawaian		100%	86.000.000	APBD		100%	95.000.000
5	03	01	2.07	02	-	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	BKPSDM	Kepegawaian		1 Unit	25.000.000	APBD		1 Unit	35.000.000
5	03	01	2.07	05	-	Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang diadakan	BKPSDM	Kepegawaian		3 Unit	26.000.000	APBD		3 Unit	20.000.000
5	03	01	2.07	06	-	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	BKPSDM	Kepegawaian		3 Unit	35.000.000	APBD		3 Unit	40.000.000

5	03	01	2.08		-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	BKPSDM	Kepegawaian		100%	104.000.000	APBD		100%	130.000.000
5	03	01	2.08	01	-	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	BKPSDM	Kepegawaian		12 Laporan	60.000.000	APBD		12 Laporan	80.000.000
5	03	01	2.08	02	-	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	BKPSDM	Kepegawaian		12 Laporan	12.000.000	APBD		12 Laporan	15.000.000
5	03	01	2.08	03	-	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah satuan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	BKPSDM	Kepegawaian		12 Laporan	12.000.000	APBD		12 Laporan	15.000.000
5	03	01	2.08	04	-	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	BKPSDM	Kepegawaian		12 Laporan	20.000.000	APBD		12 Laporan	20.000.000
5	03	01	2.09		-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	BKPSDM	Kepegawaian		100%	80.000.000	APBD		100%	85.000.000
5	03	01	2.09	01	-	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	BKPSDM	Kepegawaian		5 Unit	40.000.000	APBD		5 Unit	45.000.000
5	03	01	2.09	02	-	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	BKPSDM	Kepegawaian		4 Unit	15.000.000	APBD		4 Unit	15.000.000
5	03	01	2.09	06	-	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	BKPSDM	Kepegawaian		5 Unit	5.000.000	APBD		5 Unit	5.000.000
5	03	01	2.09	08	-	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	BKPSDM	Kepegawaian		1 Unit	20.000.000	APBD		1 Unit	20.000.000
5	03	02			2.	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan formasi	BKPSDM	Kepegawaian		89,24%	854.000.000	APBD		91,02%	930.000.000
							Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya				12,69%				16,77%	

								Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya				95,32%				97,00%	
								Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik				94,32%				97,20%	
5	03	02	2.01			-	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Persentase Pengadaan ASN, Pemberhentian ASN dan Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Kepegawaian		100%	394.000.000	APBD		100%	425.000.000
5	03	02	2.01	02		-	Penyusunan rencana kebutuhan , jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM	Kepegawaian		2 Dok	39.000.000	APBD		2 Dok	45.000.000
5	03	02	2.01	03		-	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan ASN dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	Kepegawaian		2 Dok	150.000.000	APBD		2 Dok	170.000.000
5	03	02	2.01	04		-	Evaluasi pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Peserta CASN	BKPSDM	Kepegawaian		2 lap	10.000.000	APBD		2 lap	10.000.000
5	03	02	2.01	06		-	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM	Kepegawaian		130 Dok	15.000.000	APBD		140 Dok	20.000.000
5	03	02	2.01	10		-	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah data PNS yang di kelola Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Kepegawaian		4800 Dok	150.000.000	APBD		4700 Dok	145.000.000
5	03	02	2.01	11		-	Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	BKPSDM	Kepegawaian		4800 Dok	30.000.000	APBD		4700 Dok	35.000.000
5	03	02	2.02			-	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelayanan mutasi dan promosi ASN	BKPSDM	Kepegawaian		100%	220.000.000	APBD		100%	230.000.000
5	03	02	2.02	01		-	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi antar Daerah	BKPSDM	Kepegawaian		55 Org	30.000.000	APBD		56 Org	35.000.000
5	03	02	2.02	02		-	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	Kepegawaian		627 Lap	140.000.000	APBD		640 Lap	145.000.000

5	03	02	2.02	03	-	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM	Kepegawaian		405 Dok	50.000.000	APBD		410 Dok	50.000.000
5	03	02	2.03		-	Pengembangan kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	BKPSDM	Kepegawaian		100%	125.000.000	APBD		100%	140.000.000
5	03	02	2.03	01	-	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	BKPSDM	Kepegawaian		20 Org	20.000.000	APBD		20 Org	20.000.000
5	03	02	2.03	03	-	Pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang mendapat Sertifikat Diklat	BKPSDM	Kepegawaian		50 Dok	10.000.000	APBD		50 Dok	10.000.000
5	03	02	2.03	04	-	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah Pegawai Mengikuti Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM	Kepegawaian		70 Dok	15.000.000	APBD		80 Dok	15.000.000
5	03	02	2.03	05	-	Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	Jumlah kegiatan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	BKPSDM	Kepegawaian		2 Dok	10.000.000	APBD		2 Dok	10.000.000
5	03	02	2.03	06	-	Fasilitasi sertifikasi jabatan ASN (UD, PI)	Jumlah ASN yang Mengikuti Sertifikasi	BKPSDM	Kepegawaian		50 Org	30.000.000	APBD		50 Org	35.000.000
5	03	02	2.03	10	-	Fasilitasi sertifikasi fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mengikuti Sertifikasi Fungsional	BKPSDM	Kepegawaian		40 Org	10.000.000	APBD		50 Org	15.000.000
5	03	02	2.03	14	-	Fasilitasi pengembangan karier dalam jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional Yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	BKPSDM	Kepegawaian		60 Dok	30.000.000	APBD		70 Dok	35.000.000
5	03	02	2.04		-	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	BKPSDM	Kepegawaian		100%	115.000.000	APBD		100%	135.000.000
5	03	02	2.04	02	-	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Kepegawaian		12 Dok	20.000.000	APBD		12 Dok	20.000.000
5	03	02	2.04	05	-	Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai	Jumlah ASN Yang Diberikan Tanda Jasa	BKPSDM	Kepegawaian		170 Org	30.000.000	APBD		180 Org	35.000.000
5	03	02	2.04	07	-	Pembinaan disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	BKPSDM	Kepegawaian		20 Org	30.000.000	APBD		20 Org	35.000.000
5	03	02	2.04	08	-	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM	Kepegawaian		12 Lap	35.000.000	APBD		12 Lap	45.000.000
						Pendidikan dan Pelatihan						1.700.000.000	APBD			1.750.000.000

5	04	02				1.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar Manajerial dan Fungsional	BKPSDM	Pendidikan dan pelatihan		87,27%	1.700.000.000	APBD		88,95%	1.750.000.000
								Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	BKPSDM	Pendidikan dan pelatihan		17,23%		APBD		22,75%	
								Persentase ASN yang memiliki Sertifikasi Kompetensi	BKPSDM	Pendidikan dan pelatihan		12,69%		APBD		14,73%	
								Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	BKPSDM	Pendidikan dan pelatihan		2,150%		APBD		2,373%	
5	04	02	2.01			-	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase aparatur yang bersertifikat kompetensi teknis	BKPSDM	Pendidikan dan pelatihan		100%	120.000.000	APBD		100%	140.000.000
5	4	02	2.01	03		-	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	BKPSDM	Pendidikan dan pelatihan		40 orang	100.000.000	APBD		45 orang	120.000.000
5	4	02	2.01	04		-	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	BKPSDM	Pendidikan dan pelatihan		2 Dok	20.000.000	APBD		2 Dok	20.000.000

							dan Urusan Pemerintahan Umum										
5	04	02	2.02			-	Sertifikasi, Kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Persentase aparatur yang bersertifikat kompetensi manajerial dan fungsional	BKPSDM	Pendidikan dan pelatihan		100%	1.580.000.000	APBD		100%	1.610.000.000
5	4	02	2.02	07		-	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi Pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, Jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM	Pendidikan dan pelatihan		150 orang	1.580.000.000	APBD		160 orang	1.610.000.000
Jumlah													6.434.368.148				6.647.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator serta target kinerja, serta pagu indikatif perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025–2029.

Selanjutnya, Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja Tahun 2027 ini akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Tana Toraja dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2027.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja Tahun 2027 sangat bergantung pada peran, komitmen, serta tanggung jawab seluruh aparatur di lingkungan BKPSDM Kabupaten Tana Toraja. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama, koordinasi, dan sinergi yang baik agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan optimal dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja Tahun 2027 ini, diharapkan dapat terwujud keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan. Selain itu, Renja ini juga diharapkan menjadi pedoman sekaligus tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja pada Tahun Anggaran 2027.